

ABSTRAK

Prihantoro Kurniawan (01659200074)

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEMOHON DALAM LAYANAN PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

(V+153 halaman)

SABH pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan pada perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan secara formil dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, kemudahan dari SABH ini bukan tanpa kekurangan, melainkan terdapat kecenderungan tidak tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris yang dilakukan dengan menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan pendekatan Pendekatan terhadap kasus hukum (*case study*), kemudian dalam penganalisisan data menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang dihadapi yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah Permenkumham No. 4 Tahun 2014 jo Permenkumham No. 1 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020. Terdapat kelemahan Kemenkumham dalam mengawasi pelaksanaan SABH, perlu dilakukan penyesuaian dengan sistem elektronik dari lembaga negara lainnya, harus dilakukan amandemen pada Permenkumham yang berlaku saat ini, yang mana aturan hukum yang seharusnya diterapkan apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT pada penggunaan SABH di Ditjen AHU Kemenkumham, yaitu melakukan perubahan rumusan pada Pasal 32 Permenkumham No 4 Tahun 2014 yang isinya termuat tentang pemberian kekuasaan kepada Menteri atau jajarannya untuk mengambil sikap atas produk hukum yang dikeluarkan pada SABH, serta melakukan pemeriksaan secara manual atas seluruh data yang diinput pada SABH sebelum dikeluarkannya keputusan atau pemberitahuan.

Refrensi : 71 (1980-2020)

Kata kunci : Sistem Administrasi Badan Hukum, Tanggung Jawab, Notaris.

ABSTRACT

Prihantoro Kurniawan (01659200074)

LEGAL RESPONSIBILITIES OF NOTARIES AS APPLICANTS IN LIMITED COMPANY SERVICES IN THE ADMINISTRATION SYSTEM OF LAW ENTITIES (SABH) AT THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

(V+153 pages)

The Legal Entity Administration System (SABH) basically aims to provide convenience for limited liability companies to obtain formal approval in every business activity they carry out. However, the ease of SABH is not without drawbacks, but there is a tendency of not achieving legal certainty. This research is a normative-empirical research conducted by analyzing the implementation of normative legal provisions (laws) with an approach to case law (case study), then in analyzing the data using a deductive method, namely drawing conclusions from a problem faced that is specific. The results of this study are Permenkumham No. 4 of 2014 in conjunction with Permenkumham No. 1 of 2016 and Minister of Law and Human Rights Number 14 of 2020. There is a weakness in the Ministry of Law and Human Rights in supervising the implementation of SABH, it is necessary to make adjustments to the electronic system of other state institutions, amendments must be made to the current Permenkumham, which legal rules should be applied in the event of an Action Against The law against PT on the use of SABH at the Directorate General of AHU of the Ministry of Law and Human Rights, namely making changes to the formulation in Article 32 of the Minister of Law and Human Rights No. 4 of 2014 which contains the granting of power to the Minister or his staff to take a stand on legal products issued on SABH, as well as conducting manual checks on all data entered in the SABH prior to the issuance of a decision or notification.

References : 71 (1980-2020)

Keywords: Legal Entity Administration System, Responsibility, Notary.